



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Membaca :
1. Surat Kepala Dinas Peternakan Nomor 007-Disnak/Prod/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 perihal Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi per Kecamatan tahun 2016.
 2. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nomor 500-08/DPK-LKT/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2016.
 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 525-2987/HUTBUN-III/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Rencana Sebaran per Kecamatan Pupuk Bersubsidi Sub. Sektor Perkebunan Kabupaten Langkat Tahun 2016.
 4. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor 777-Diperta/KP/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Rencana Sebaran per-Kecamatan Pupuk Bersubsidi sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Langkat Tahun 2016.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, perlu dijabarkan dan ditindaklanjuti untuk tingkat Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tk.II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Madya Daerah Tk II Binjai, Kabupaten Daerah Tk. II Langkat dan Kabupaten Daerah Tk.II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4254);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/ 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas yang menggunakan pupuk bersubsidi antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.

6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
15. Pelaksanaan subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam.
 - b. Petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
 - c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

Pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati menetapkan alokasi per kecamatan berdasarkan sub sektor, sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

- (2) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 6

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayahnya.

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing masing wilayah.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (Enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Daerah.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Gubernur.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penyalur di lini III dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg;

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di lini I s/d lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KPPP) Daerah wajib melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dan Pestisida.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida (KPPP) Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

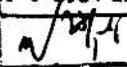
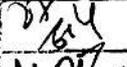
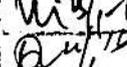
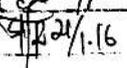
- (1) KPPP Daerah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Ekabangs	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 28 Januari 2016

BUPATI LANGKAT,


NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


INDRA SALAHUDIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

TANGGAL 28 Januari 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 KABUPATEN LANGKAT MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS

(TON)

NO	SUB SEKTOR	UREA	NPK	ZA	SP-36	ORGANIK
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	12.528	9.573	2.675	3.516	1.419
2	Kehutanan dan Perkebunan	2.500	2.100	70	1.000	-
3	Peternakan	-	-	-	-	-
4	Perikanan Budidaya	80	9	10	40	-
	Jumlah	15.108	11.682	2.755	4.556	1.419

JABATAN	PARA
SEKRETARIS DAERAH	N/21/16
ASISTEN ADM Ekbangsos	21/16
KABAG HUKUM	21/16
KASUBBAG T. Hukum	21/16
STAF BAGIAN HUKUM	21/16

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 1 Tahun 2016

TANGGAL 20 Januari 2016.

TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

KABUPATEN LANGKAT MENURUT JENIS DAN SEBARAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	NPK	ZA	SP-36	ORGANIK
1	Babalan	860	857	260	340	137
2	Bahorok	480	250	70	145	24
3	Kuala	785	277	87	225	32
4	Batang Serangan	142	162	7	80	4
5	Binjai	1,012	608	206	180	113
6	Serapit	854	583	145	305	92
7	Besitang	754	588	94	360	48
8	Pangkalan Susu	506	654	95	246	76
9	Kutambaru	78	33	4	35	0
10	Brandan Barat	192	346	81	118	47
11	Gebang	834	714	100	184	97
12	Padang Tualang	250	257	27	67	17
13	Sei Lapan	765	605	118	207	65
14	Stabat	883	529	171	196	50
15	Pematang Jaya	121	228	48	70	28
16	Sawit Seberang	54	42	3	30	0
17	Selesai	622	581	112	189	57
18	Sei Bingai	1,792	1,058	523	560	105
19	Salapian	217	114	20	130	5
20	Secanggang	1,737	1,390	359	529	202
21	Wampu	433	376	40	110	34
22	Tanjung Pura	1,006	850	70	130	122
23	Hinai	731	580	115	120	64
J U M L A H		15,108	11,682	2,755	4,556	1,419

JABATAN
 SEKRETARIS DAERAH
 Ekbangso
 T. Hukam

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Lampiran II.1 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 Tahun 2016.
 Tanggal 20 Januari 2016

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	20	20	50	52	80	80	80	100	85	75	75	52	769
2	Bahorok	20	20	20	50	50	30	30	30	60	60	30	25	425
3	Kuala	40	80	59	59	59	59	84	59	59	59	59	59	715
4	Batang Serangan	0	15	0	0	0	0	0	4	15	0	0	0	34
5	Binjai	60	80	80	82	75	75	82	60	80	80	75	75	904
6	Serapit	58	58	58	58	58	58	58	59	58	58	58	58	697
7	Besitang	0	30	40	40	50	50	30	30	50	50	34	50	454
8	Pangkalan Susu	0	10	10	40	50	50	40	20	50	50	40	40	400
9	Kutambaru	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	38
10	Brandan Barat	0	13	0	14	25	28	13	0	13	25	25	0	156
11	Gebang	0	40	48	20	80	80	80	80	100	80	60	60	728
12	Padang Tualang	0	10	10	30	20	0	20	20	20	20	20	20	190
13	Sei Lapan	38	38	39	60	60	38	38	38	62	60	38	40	549
14	Stabat	30	75	70	62	40	62	62	79	75	75	40	75	745
15	Pematang Jaya	0	10	5	10	25	5	5	10	25	5	5	0	105
16	Sawit Seberang	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	20
17	Selesai	43	48	43	43	43	48	44	43	43	43	43	43	527
18	Sei Bingai	100	100	160	149	100	180	149	100	149	170	180	180	1,717
19	Salapian	14	20	0	5	20	20	5	0	20	5	5	0	114
20	Secanggih	100	100	100	130	130	100	100	140	187	140	133	123	1,483
21	Wampu	0	0	20	50	33	30	20	40	20	30	30	20	293
22	Tanjung Pura	70	73	70	70	70	70	71	71	71	70	70	70	846
23	Hinai	10	10	25	100	75	25	50	100	75	100	25	19	619
	JUMLAH	603	830	907	1,134	1,146	1,093	1,075	1,098	1,322	1,260	1,050	1,014	12,528

SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADM Ekangros
 KAB/NG HUKUM
 KASUBBAG T Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT
 NGOGESA SITEPU

Lampiran II.2 Peraturan Bupati Langkat

Nomor 1 Tahun 2016.

Tanggal 28 Januari 2016.

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	0	10	12	10	5	0	0	10	13	10	5	75
2	Bahorok	0	0	8	12	8	0	0	0	8	11	8	0	55
3	Kuala	0	0	14	15	4	2	0	0	14	15	4	2	70
4	Batang Serangan	0	10	20	15	7	4	0	10	20	10	8	4	108
5	Binjai	0	10	15	20	9	0	0	15	17	15	7	0	108
6	Serapit	0	0	20	40	13	7	0	15	17	30	10	5	157
7	Besitang	0	30	40	35	25	20	0	30	40	35	25	20	300
8	Pangkalan Susu	0	10	10	10	10	5	0	10	10	10	10	5	90
9	Kutambaru	0	0	4	6	6	4	0	4	6	6	4	0	40
10	Brandan Barat	0	0	4	6	0	0	0	0	4	6	0	0	20
11	Gebang	0	10	10	12	8	5	0	0	13	15	12	5	90
12	Padang Tualang	0	0	5	10	10	5	0	0	10	10	5	5	60
13	Sei Lapan	0	20	35	30	15	8	0	20	35	30	15	8	216
14	Stabat	0	10	29	25	16	4	10	15	10	9	6	4	138
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sawit Seberang	0	0	4	10	3	0	0	0	10	4	3	0	34
17	Selesai	0	0	10	17	15	5	0	0	15	18	10	5	95
18	Sei Bingai	0	0	5	14	13	5	0	10	10	13	5	0	75
19	Salapian	0	10	15	15	11	0	0	10	15	15	12	0	103
20	Secanggang	0	20	35	32	30	10	0	20	35	32	30	10	254
21	Wampu	0	10	20	20	15	5	0	10	20	20	15	5	140
22	Tanjung Pura	0	20	30	22	7	4	0	0	20	30	22	5	160
23	Hinai	0	0	13	20	15	10	0	10	15	15	10	4	112
JUMLAH		0	160	356	398	250	108	10	179	354	362	231	92	2,500

W. KETARIS DAERAH
 B. KASUBAG T. HUKUM
 21/1/16

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA

(TON)

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	16
2	Bahorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Batang Serangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Serapit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Besitang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pangkalan Susu	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	16
9	Kutambaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Brandan Barat	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	16
11	Gebang	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	16
12	Padang Tualang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sei Lapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Stabat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	16
16	Sawit Seberang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Selesai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sei Bingai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Salapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Secanggang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tanjung Pura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hinai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	80											

LANGKAT
 40 NETARIS PAERAH
 ASISTEN ADM Ekhangos
 KEPYAS HUKUM
 KAPUSKAS T. Hukum
 STAF BESILAN HUKUM
 18/01/16

BUPATI LANGKAT

 NGOGESA SITEPU

Lampiran II.4 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 Tahun 2016.
 Tanggal 28 Januari 2016.

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK (PHONSKA) BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	29	50	50	100	70	50	50	49	100	100	100	49	797
2	Bahorok	10	10	10	22	15	10	10	60	22	21	10	10	210
3	Kuala	17	16	16	17	16	17	16	16	47	17	16	16	227
4	Batang Serangan	10	0	0	0	0	0	6	10	0	20	20	0	66
5	Binjai	35	36	38	35	36	85	35	36	86	35	36	35	528
6	Serapit	36	36	61	36	36	36	36	61	36	36	36	35	481
7	Besitang	10	10	24	24	44	24	24	60	36	34	24	24	338
8	Pangkalan Susu	12	12	42	42	73	67	42	72	42	67	42	42	555
9	Kutamaru	0	0	0	0	0	5	5	3	0	0	0	0	13
10	Brandan Barat	0	22	22	22	42	22	35	22	21	55	21	22	306
11	Gebang	19	19	39	39	89	60	39	90	39	59	89	39	620
12	Padang Tualang	0	8	10	8	33	8	43	8	8	33	35	8	202
13	Sei Lapan	11	11	35	56	31	51	56	56	35	51	31	31	455
14	Stabat	10	27	25	27	75	40	25	27	75	28	25	25	409
15	Pematang Jaya	0	17	14	15	14	15	39	15	28	17	39	15	228
16	Sawit Seberang	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	12
17	Selesai	34	35	59	35	34	60	36	35	34	60	34	33	489
18	Sei Bingai	63	63	130	63	63	163	63	64	63	113	63	63	974
19	Salapian	0	10	0	0	0	10	6	0	0	0	0	0	26
20	Secanggang	80	87	87	87	100	87	87	137	87	87	150	74	1,150
21	Wampu	0	6	6	10	16	56	12	58	10	10	56	6	246
22	Tanjung Pura	45	45	50	95	45	45	95	50	45	95	95	45	750
23	Hinai	12	12	32	33	32	33	53	83	33	53	83	32	491
J U M L A H		433	532	750	772	864	944	813	1,018	847	991	1,005	604	9,573

WAKIL BUPATI LANGKAT
 BRIPTEN ADM. Ekbangsari
 KORBAS HUKUM
 t. Hukum
 STAF KABIDAN HUKUM
 28/1/16

BUPATI LANGKAT
 NGOGESA SITEPU

Lampiran II.5 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 tahun 2016.
 Tanggal 20 Januari 2016.

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK (PHONSKA) BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	0	8	13	7	2	0	0	8	13	7	2	60
2	Bahorok	0	0	7	9	4	0	0	0	7	10	3	0	40
3	Kuala	0	0	7	10	8	0	0	0	7	10	8	0	50
4	Batang Serangan	0	10	15	15	6	4	0	10	10	15	6	5	96
5	Binjai	0	6	9	11	8	6	0	8	6	11	8	7	80
6	Serapit	0	10	20	10	7	4	0	10	20	10	7	4	102
7	Besitang	0	20	35	35	20	15	0	20	35	35	20	15	250
8	Pangkalan Susu	0	10	15	10	7	3	0	10	15	10	7	3	90
9	Kutambaru	0	0	0	4	4	2	0	0	4	4	2	0	20
10	Brandan Barat	0	0	5	10	5	0	0	0	5	10	5	0	40
11	Gebang	0	8	10	15	10	4	0	8	10	15	10	4	94
12	Padang Tualang	0	0	6	12	10	4	0	0	8	11	4	0	55
13	Sei Lapan	0	10	20	18	15	12	0	10	20	18	15	12	150
14	Stabat	0	14	20	20	5	0	14	10	22	10	5	0	120
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sawit Seberang	0	0	4	5	4	2	0	0	4	5	4	2	30
17	Selesai	0	0	15	14	10	5	0	0	15	14	10	9	92
18	Sei Bingai	0	0	10	15	10	7	0	0	10	15	12	5	84
19	Salapian	0	10	10	20	4	2	0	10	20	10	2	0	88
20	Secanggang	0	20	40	25	20	15	0	20	40	25	20	15	240
21	Wampu	0	20	25	10	7	3	0	20	25	10	7	3	130
22	Tanjung Pura	0	10	15	15	6	4	0	10	15	15	6	4	100
23	Hinai	0	0	10	15	10	5	0	0	19	15	10	5	89
	JUMLAH	0	148	306	311	187	99	14	146	325	291	178	95	2,100

JABATAN
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN AUM Ekbangos
 KASUBSANG 7-Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM
 16/1/16

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

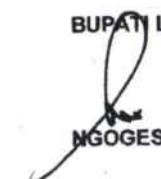
Lampiran II.6 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 Tahun 2016
 Tanggal 28 Januari 2016

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Batang Serangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Serapit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Besitang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pangkalan Susu	0	0	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	9
9	Kutambaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Brandan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gebang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Padang Tualang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sei Lelan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Stabat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sawit Seberang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Selesai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sei Bingai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Salapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Secanggih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tanjung Pura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hinal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	5	0	0	4	0	0	0	9

JABATAN
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADM Ekhangbos
 KASUBSAG 7-Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM
 18/1/16

BUPATI LANGKAT

 NGOGESA SITEPU

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	21	0	21	42	21	21	21	22	43	22	21	255
2	Bahorok	6	6	6	5	6	6	6	5	6	6	6	6	70
3	Kuala	7	8	7	7	7	8	7	7	8	7	7	7	87
4	Batang Serangan	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7
5	Binjai	17	17	18	17	17	17	17	18	17	17	17	17	206
6	Serapit	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	145
7	Besitang	0	7	8	8	8	8	8	15	8	8	8	8	94
8	Pangkalan Susu	0	7	0	7	7	7	8	15	8	15	8	8	90
9	Kutambaru	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
10	Brandan Barat	0	6	0	7	7	7	13	7	7	13	7	7	81
11	Gebang	0	9	0	8	8	16	8	8	17	8	9	9	100
12	Padang Tualang	0	0	4	0	5	0	5	4	4	0	5	0	27
13	Sei Lapan	0	9	10	0	10	19	10	10	10	20	10	10	118
14	Stabat	0	9	0	8	9	8	17	9	8	17	8	8	101
15	Pematang Jaya	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	8	0	48
16	Sawit Seberang	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
17	Selesai	9	9	10	9	9	10	9	9	10	10	9	9	112
18	Sei Bingai	34	44	45	45	44	44	45	45	44	45	44	44	523
19	Salapian	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	0	0	20
20	Secanggang	0	30	30	30	59	30	30	30	30	30	30	30	359
21	Wampu	0	5	0	5	0	5	0	5	5	5	5	5	40
22	Tanjung Pura	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	70
23	Hinai	0	10	0	9	10	10	18	10	10	19	10	9	115
	JUMLAH	90	226	156	213	271	254	245	245	236	289	231	215	2,675

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN AUM Ekhangso

KABANG HUKUM

KASUBDING T. Hukum

STAF BAGIAN HUKUM

BUPAT LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Lampiran II.8 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 Tahun 2016.
 Tanggal 20 Januari 2016.

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bahorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Batang Serangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Serapit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Besitang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pangkalan Susu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kutambaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Brandan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gebang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Padang Tualang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sei Lapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Stabat	0	20	20	10	0	0	20	0	0	0	0	0	70
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sawit Seberang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Selesai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sei Bingai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Salapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Secanggang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tanjung Pura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hinai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	20	20	10	0	70							

JABATAN HUKUM
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADM Ekangso
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG T. Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT
 NGOGESA SITEPU

**REKAPITULASI RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK) PUPUK BESUBSIDI TAHUN 2016
SE-KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

No	Nama Kecamatan	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Ton)								KET		
				UREA		SP-36		ZA		NPK PHONSKA			ORGANIK	
				Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II		Semester I	Semester II
1	Babalan	K. Sawit	557	79,372.50	79,372.50	62,662.50	62,662.50	0	0	55,700	55,700	0	0	
2	Bahorok	K. Sawit/Karet	315	44,887.50	44,887.50	35,437.50	35,437.50	0	0	31,500	31,500	0	0	
3	Kuala	K. Sawit	217	30,922.50	30,922.50	24,412.50	24,412.50	0	0	21,700	21,700	0	0	
4	Batang Serangan	K. Sawit	515	73,387.50	73,387.50	57,937.50	57,937.50	0	0	51,500	51,500	0	0	
5	Binjai	K. Sawit	452	64,410	64,410	50,850	50,850	0	0	45,200	45,200	0	0	
6	Sirapit	K. Sawit/Karet	826	117,705	117,705	92,925	92,925	0	0	82,600	82,600	0	0	
7	Besitang	K. Sawit	1,830	260,775	260,775	205,875	205,875	0	0	183,000	183,000	0	0	
8	Pangkan Susu	K. Sawit	500	71,250	71,250	56,250	56,250	0	0	50,000	50,000	0	0	
9	Kutambaru	K. Sawit/Karet	200	28,500	28,500	22,500	22,500	0	0	20,000	20,000	0	0	
10	Brandan Barat	K. Sawit	300	42,750	42,750	33,750	33,750	0	0	30,000	30,000	0	0	
11	Gebang	K. Sawit	586	83,505	83,505	65,925	65,925	0	0	58,600	58,600	0	0	
12	Padang Tualang	K. Sawit	630	89,775	89,775	70,875	70,875	0	0	63,000	63,000	0	0	
13	Sei Lapan	K. Sawit	1,088	155,040	155,040	122,400	122,400	0	0	108,800	108,800	0	0	
14	Stabat	K. Sawit/Tebu	772.8	110,124	110,124	86,940	86,940	50	20	77,280	77,280	0	0	
15	Pematang Jaya	K. Sawit	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Sawit Seberang	K. Sawit	363	51,727.50	51,727.50	40,837.50	40,837.50	0	0	36,300	36,300	0	0	
17	Selesai	K. Sawit	1,047	149,197.50	149,197.50	117,787.50	117,787.50	0	0	104,700	104,700	0	0	
18	Sei Bingai	K. Sawit	465	66,262.50	66,262.50	52,312.50	52,312.50	0	0	46,500	46,500	0	0	
19	Salapian	K. Sawit/Karet	552.7	78,759.75	78,759.75	62,178.75	62,178.75	0	0	55,270	55,270	0	0	
20	Secanggang	K. Sawit	1,340.3	190,992.75	190,992.75	150,783.75	150,783.75	0	0	134,030	134,030	0	0	
21	Wampu	K. Sawit	476	67,830	67,830	53,550	53,550	0	0	47,600	47,600	0	0	
22	Tanjung Pura	K. Sawit	761.6	108,532.28	108,532.28	85,683.38	85,683.38	0	0	76,163	76,163	0	0	
23	Hinai	K. Sawit	704	100,320	100,320	79,200	79,200	0	0	70,400	70,400	0	0	
Jumlah			14,498.4	2,066,026.28	2,066,026.28	1,631,073.38	1,631,073.38	50	20	1,449,843	1,449,843	0	0	

JABATAN DAERAH
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN DAERAH Ekbangsot
 KASUBBAG T. Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

**REKAPITULASI RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK) PUPUK BESUBSIDI TAHUN 2016
SE-KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

No	Nama Kecamatan	Luas tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Ton)																			KET	
			UREA				SP-36				ZA				NPK PHONSKA				ORGANIK				
			MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III	Jumlah	MT I	MT II	MT III		Jumlah
1	Babalan	8201	820	-	820	1640	410	-	410	820	295	-	295	590	410	-	410	820	259	-	259	518	
2	Bahorok	1440	96	96	96	288	48	48	48	144	35	35	35	105	48	48	48	144	-	-	-	-	
3	Kuala	2018	135	135	135	405	67	67	67	201	48	48	48	144	67	67	67	201	300	200	158	658	
4	Batang Serangan	232	23	-	23	46	12	-	12	24	8	-	8	16	12	-	12	24	-	-	-	-	
5	Binjai	4200	280	280	280	840	140	140	140	420	101	101	101	303	140	140	140	420	186	186	186	558	
6	Sirapit	4380	292	292	292	876	146	146	146	438	105	105	105	315	146	146	146	438	193	210	177	580	
7	Besitang	2812	281	-	281	562	141	-	141	282	101	-	101	202	141	-	141	282	-	-	-	-	
8	Pangkan Susu	5968	597	-	597	1194	298	-	298	596	215	-	215	430	298	-	298	596	16	-	16	32	
9	Kutambaru	30	3	-	3	6	2	-	2	4	1	-	1	2	2	-	2	4	-	-	-	-	
10	Brandan Barat	2726	273	-	273	546	136	-	136	272	98	-	98	196	136	-	136	272	-	-	-	-	
11	Gebang	5570	557	-	557	1114	279	-	279	558	201	-	201	402	279	-	279	558	-	-	-	-	
12	Padang Tualang	1178	118	-	118	236	59	-	59	118	42	-	42	84	59	-	59	118	-	-	-	-	
13	Sei Lapan	3832	383	-	383	766	192	-	192	384	138	-	138	276	192	-	192	384	-	-	-	-	
14	Stabat	3020	302	-	302	604	151	-	151	302	109	-	109	218	151	-	151	302	228	-	228	456	
15	Pematang Jaya	1692	169	-	169	338	85	-	85	170	61	-	61	122	85	-	85	170	18	-	17	35	
16	Sawit Seberang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Selesai	3478	232	232	232	696	116	116	116	348	83	83	83	249	116	116	116	348	301	301	301	903	
18	Sei Bingai	6538	436	436	436	1308	218	218	218	654	157	157	157	471	218	218	218	654	-	-	-	-	
19	Salapian	342	23	23	23	69	11	11	11	33	8	8	8	24	11	11	11	33	-	-	-	-	
20	Secanggih	11652	1165	-	1165	2330	583	-	583	1166	419	-	419	838	583	-	583	1166	-	-	-	-	
21	Wampu	2038	204	-	204	408	102	-	102	204	73	-	73	146	102	-	102	204	20	-	20	40	
22	Tanjung Pura	7075	472	472	472	1416	236	236	236	708	170	170	170	510	236	236	236	708	-	-	-	-	
23	Hinai	3856	386	-	386	772	193	-	193	386	139	-	139	278	193	-	193	386	733	-	733	1466	
	Jumlah	82278	7247	1966	7247	16460	3625	982	3289	7896	2607	707	2607	5921	3625	982	3625	8232	2254	897	2095	5246	

JABATAN
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADI EKSPANSI
KASUBBAG T. HUKUM
STAF BAGIAN HUKUM

[Handwritten signatures and dates]

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Lampiran II.13 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 Tahun 2016
 Tanggal 28 Januari 2016

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Babalan	0	0	0	26	31	11	0	0	26	32	11	0	137
2	Bahorok	0	0	1	11	0	0	0	0	1	11	0	0	24
3	Kuala	2	1	4	4	3	0	1	5	6	0	6	0	32
4	Batang Serangan	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	4
5	Binjai	0	22	0	21	21	22	0	0	4	23	0	0	113
6	Serapit	8	4	9	8	8	9	9	8	8	4	9	8	92
7	Besitang	0	0	0	0	11	13	0	0	0	11	13	0	48
8	Pangkalan Susu	0	0	0	0	8	2	18	0	6	32	10	0	76
9	Kutambaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Brandan Barat	0	0	0	0	0	6	17	0	0	7	17	0	47
11	Gebang	0	0	0	0	17	31	0	0	0	21	28	0	97
12	Padang Tualang	0	0	0	0	6	3	0	0	1	3	4	0	17
13	Sei Lapan	0	0	0	16	9	7	0	0	2	13	9	9	65
14	Stabat	0	6	0	4	0	10	0	4	13	13	0	0	50
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	28
16	Sawit Seberang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Selesai	3	6	5	5	7	7	4	2	6	7	3	2	57
18	Sei Bingai	3	0	0	0	29	20	0	0	53	0	0	0	105
19	Salapian	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	5
20	Secanggang	0	0	0	0	22	45	32	2	5	31	51	14	202
21	Wampu	0	0	0	0	9	8	0	0	0	9	8	0	34
22	Tanjung Pura	14	22	11	0	0	20	22	5	0	0	13	15	122
23	Hinai	6	0	0	12	5	5	0	11	20	0	0	5	64
	J U M L A H	36	61	30	111	200	219	103	37	170	217	182	53	1,419

JABATAN PA
 WAKIL BUNDA RAJA
 BISTEN ADM Ekang 603
 K. DEAN M. N. M. 24/1/16
 T. HUBAUM R. 21/1/16
 STAF BUNDA RAJA M. 21/1/16

BUPATI LANGKAT
 NGOGESA SITEPU

Lampiran II.9 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 Tahun 2016
 Tanggal 28 Januari 2016

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA

(TON)

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	Babalan	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	5
2	Bahorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Batang Serangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Serapit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Besitang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pangkalan Susu	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5
9	Kutambaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Brandan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gebang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Padang Tualang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sei Lapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Stabat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sawit Seberang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Selesai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sei Bingai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Salapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Secanggih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tanjung Pura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hinai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	2	0	0	0	0	10							

B. ADAMIAN
 KASUBSAG T. HUKUM
 STAF BAGIAN HUKUM
 28/1/16

BUPATI LANGKAT
 NGOGESA SITEPU

Lampiran II.10 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor Tahun 2016.
 Tanggal 28 Januari 2016.

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	25	15	25	50	25	25	35	25	35	25	15	300
2	Bahorok	5	5	5	25	20	10	5	5	20	20	0	0	120
3	Kuala	15	17	16	17	16	16	16	17	16	17	16	16	195
4	Batang Serangan	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	40
5	Binjai	10	12	14	13	14	13	13	13	14	13	13	13	155
6	Serapit	13	14	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	265
7	Besitang	0	10	18	19	19	36	18	18	27	19	18	18	220
8	Pangkalan Susu	0	10	15	20	15	30	16	16	10	22	16	16	186
9	Kutamaru	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5
10	Brandan Barat	0	0	7	8	8	7	8	14	8	15	8	7	90
11	Gebang	0	10	12	11	22	11	12	13	12	12	12	11	138
12	Padang Tualang	0	3	0	3	3	7	3	3	6	3	3	3	37
13	Sei Lapan	0	12	13	12	24	13	10	14	13	12	12	12	147
14	Stabat	0	12	0	11	12	22	11	12	22	12	11	11	136
15	Pematang Jaya	0	5	0	5	6	4	10	6	6	10	6	6	64
16	Sawit Seberang	0	0	0	3	0	3	0	4	0	0	0	0	10
17	Selesai	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	12	149
18	Sei Bingai	25	45	25	45	45	45	45	45	65	45	45	45	520
19	Salapian	10	15	5	0	10	10	0	0	10	5	5	0	70
20	Secanggang	0	40	40	40	40	79	40	40	40	40	40	40	479
21	Wampu	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	40
22	Tanjung Pura	0	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	60
23	Hinai	0	7	14	8	5	8	8	8	8	8	8	7	90
	JUMLAH	90	260	250	317	360	394	294	320	353	340	279	259	3,516

KEKABUPATEN LANGKAT
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADM Ekbangkos
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT
 NGOGESA SITEPU

Lampiran II.11 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 Tahun 2016
 Tanggal 28 Januari 2016

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT**

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	30
2	Bahorok	0	0	4	4	4	0	0	0	4	5	4	0	25
3	Kuala	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	30
4	Batang Serangan	0	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5	5	40
5	Binjai	0	0	4	4	4	0	0	0	4	5	4	0	25
6	Serapit	0	0	5	8	6	0	0	0	6	8	7	0	40
7	Besitang	0	10	20	25	15	0	0	10	20	25	15	0	140
8	Pangkalan Susu	0	5	7	8	5	0	0	5	5	7	8	0	50
9	Kutambaru	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	30
10	Brandan Barat	0	0	2	4	4	0	0	0	0	2	4	4	20
11	Gebang	0	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5	5	40
12	Padang Tualang	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	30
13	Sei Lapan	0	5	10	10	5	0	0	0	5	10	10	5	60
14	Stabat	0	5	10	10	5	0	0	0	5	10	10	5	60
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sawit Seberang	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5	5	0	20
17	Selesai	0	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5	5	40
18	Sei Bingai	0	5	5	5	5	0	0	0	5	5	5	5	40
19	Salapian	0	10	10	10	0	0	0	0	10	10	10	0	60
20	Secanggang	0	5	7	8	5	0	0	0	6	8	6	5	50
21	Wampu	0	5	12	13	5	0	0	0	5	12	13	5	70
22	Tanjung Pura	0	5	12	13	5	0	0	0	5	12	13	5	70
23	Hinai	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5	0	30
	JUMLAH	0	70	153	167	108	15	120	164	154	49	1,000		

JABATAN
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADM Ekangros
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG T-Hukum
 21/16

BUPATI LANGKAT
 NGOGESA SITEPU

Lampiran II.12 Peraturan Bupati Langkat
 Nomor 1 Tahun 2016
 Tanggal 28 Januari 2016

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2016
 DI KABUPATEN LANGKAT

SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Babalan	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	10
2	Bahorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kuala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Batang Serangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Serapit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Besitang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pangkalan Susu	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	10
9	Kutambaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Brandan Barat	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	8
11	Gebang	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	6
12	Padang Tualang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sei Lapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Stabat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pematang Jaya	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	6
16	Sawit Seberang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Selesai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sei Bingai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Salapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Secanggih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Wampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tanjung Pura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Hinai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	40

JABATAN
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN ADM Ekhangs03
 KASUBBAG T-Hukum
 STAF BAGIAN HUKUM
 21/1/16

BUPATI LANGKAT
 NGOGESA SITEPU